

Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 1990–2009

Agus Subiyanto
Sarastri Mumpuni R.***

Abstract

Inflation is an economic disease that has broadly impact to the economy as a whole. Therefore inflation oftenly becomes government policy target since it is able to lead economic instability, slow economic growth, and increase unemployment rate. The high level of inflation in Indonesia both in long and short term can be influenced by policies implemented by Central Bank (Bank Indonesia) as the monetary authority (interest rate), the the government's policy on spending (routine expense), the amount of money supply in the society, and the foreign sector (export earnings and kurs).

Keywords : *Inflation, Interest rate, money supply, routine expense, export earning and kurs*

Pendahuluan

Kehidupan ekonomi nasional mencakup jutaan orang, ribuan perusahaan besar dan kecil, serta ratusan macam barang dan jasa. Dalam dunia ekonomi modern, pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur, menstabilkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah bertugas mengatur kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan. Tugas-tugas itu antara lain mengawasi jumlah uang dalam peredaran dan kegiatan dunia perbankan, menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok, serta mengawasi ekspor-impor (T. Gilarso, 1986). Selain itu pemerintah juga sedapat mungkin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menekan laju inflasi dalam negeri. Masalah yang terakhir ini merupakan penyakit ekonomi yang mulai diperhatikan sejak era Orde Baru, karena inflasi merupakan momok bagi suatu negara dan dapat mengganggu kestabilan ekonomi dalam negeri apabila tidak segera diatasi.

** Alumni Fakultas Ekonomi UII
* Dosen Fakultas Ekonomi UII

Berakhirnya era Orde Baru, meninggalkan beberapa permasalahan yang krusial bagi pemerintahan era Reformasi. Salah satunya adalah krisis ekonomi tahun 1997 yang berimbas pada terpuruknya perekonomian Indonesia selama beberapa tahun yang menjadi awal dari tingginya tingkat inflasi di Indonesia. Tingginya angka pengangguran akibat perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena biaya produksi tidak seimbang dengan laba yang diperoleh, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah banyak yang mati suri hingga *kolaps*, memburuknya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, demonstrasi dan kerusuhan diberbagai wilayah Indonesia, melonjaknya harga-harga barang secara terus menerus yang pada ujungnya mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998.

Tabel 1
Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1988	5.47
1993	9.77
1998	77.63
2003	5.16
2008	11.06
2009	2.78

Sumber: Badan Pusat Statistik 1988-2009

Tabel di atas mengilustrasikan bahwa pada tahun 1988 tingkat inflasi berkisar 5% per tahun, sedangkan pada periode 1993 tingkat inflasi di Indonesia berkisar 9% per tahun. Dari gambaran di atas jelas terlihat bahwa tingkat inflasi sangat berfluktuatif dan tingkat inflasi ini mempengaruhi perekonomian Indonesia maupun kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memegang kendali yang sangat strategis dalam menciptakan kebijakan moneter yang stabil dalam perekonomian nasional. Bentuk kebijakan moneter yaitu; (a) kebijakan moneter kuantitatif, melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dengan mengubah tingkat diskonto dan mengubah tingkat cadangan minimum, (b) kebijakan moneter kualitatif yaitu pengawasan pinjaman secara selektif dan pembujukan moral (Sadono Sukirno, 2004). Bank Indonesia harus dapat mengukur peredaran uang, antara lain dengan menentukan tingkat suku bunga SBI. Selain itu pemerintah juga memegang peranan penting dalam mengendalikan laju inflasi, salah satu kebijakannya adalah mengatur pengeluaran rutinnya (*government expenditure*). Sektor luar negeri juga memegang peranan dalam mengendalikan tingkat inflasi diantaranya, penerimaan

ekspor. Oleh karena itu, agar dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, Bank Indonesia, pemerintah, maupun swasta (Boediono, 1985).

Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang mempunyai dampak yang sangat luas. Sebuah perekonomian akan dianggap gagal bila tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang senantiasa meningkat.

Tingginya tingkat inflasi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberapa diantaranya adalah:

- a. Peran Bank Indonesia (BI) dalam mengatur tingkat suku bunga SBI. Apabila BI ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menjual surat-surat berharganya (biasanya disebut kontraksi) yang akan berdampak pada pengurangan alat likuid bank-bank dan selanjutnya akan memperkecil kemampuan bank-bank memberikan pinjaman, demikian pula sebaliknya. Banyaknya Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dimasyarakat cenderung meningkatkan inflasi.
- b. Banyaknya JUB, menyebabkan masyarakat tidak menginginkan untuk memegang uang dan membelanjakannya meskipun ada sebagian yang menginvestasikannya. Kenaikan pada sisi permintaan akan diikuti dengan kenaikan pada penawaran dan harga barang, sehingga harga barang-barang menjadi naik. Kenaikan harga-harga barang secara terus menerus akan mengakibatkan meningkatnya tingkat inflasi.

Tabel 2

Data Jumlah Uang Beredar Beberapa Tahun

Tahun	JUB (Miliar Rp)
1995	52,677
2000	162,186
2005	281,905
2009	515,824

Sumber: Badan Pusat Statistik 1995-2009

- c. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan hutang, dan lain-lain. Semakin besar pengeluaran rutin pemerintah akan memicu peningkatan inflasi yang cukup besar, hal ini dikarenakan pengeluaran rutin dibiayai oleh pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah yang tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran pemerintah akan membuat pemerintah harus mencari alternatif penerimaan yang lain, termasuk hutang. Kenaikan pengeluaran pemerintah

akan meningkatkan permintaan total, dan hal ini akan membuat peningkatan inflasi dalam negeri. Peningkatan pengeluaran rutin pemerintah terjadi pada tahun 2000, penerimaan ekspor negara yang besar menyebabkan pembelanjaan masyarakat meningkat. Apabila harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet, timah, dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam proses produksinya (seperti perumahan, sepatu, kaleng, dan sebagainya) akan naik, dan kemudian harga jualnya akan naik pula (*cost-inflation*).

Tabel 3
Data Pengeluaran Rutin Pemerintah Beberapa Tahun

Tahun	PRP (Miliar Rp)
1995	43,179
2000	162,577
2005	361,155
2009	685,036

Sumber: Badan Pusat Statistik 1995-2009

Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, akibatnya harga barang-barang lain akan naik pula (*demand inflation*) dan inflasi akan meningkat.

- d. Dibandingkan tahun 1995 (sebelum krisis), penerimaan ekspor tahun 2005 meningkat yaitu sebesar 85,660 juta US\$. Dan meningkatnya penerimaan ekspor mulai tahun 2000, tingkat inflasi juga mulai berfluktuasi bahkan tertinggi hingga 17,11% pada tahun 2005. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya penerimaan ekspor justru akan menyebabkan inflasi meningkat.

Tabel 4
Data Penerimaan Ekspor Beberapa Tahun

Tahun	EKS (Juta US\$)
1995	45,418
2000	62,124
2005	85,660
2009	116,510

Sumber: Badan Pusat Statistik 1995-2009

Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar, yang disebabkan oleh hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta yang membengkak akan berakibat

pada menurunnya harga barang-barang ekspor di luar negeri, sehingga barang ekspor menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang dari negara lain. Penurunan harga tersebut menyebabkan penurunan penjualan barang-barang ekspor, sehingga output akan menurun yang menyebabkan berkurangnya penawaran barang. Naiknya harga-harga barang dalam negeri berdampak pada meningkatnya inflasi. Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar akan mengakibatkan tingkat inflasi menjadi tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, perlu melakukan penelitian terhadap tingginya tingkat inflasi di Indonesia dengan variabel-variabel yang berperan dalam mengendalikan tingkat inflasi yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter (tingkat suku bunga SBI), kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengeluaran pemerintah (yang meliputi pengeluaran rutin), jumlah uang yang beredar (JUB) dalam masyarakat, sektor luar negeri yaitu penerimaan ekspor dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Tabel 5
Data Kurs Rupiah terhadap Dollar Beberapa Tahun

Tahun	VAL (Rp)
1995	2,308
2000	9,595
2005	9,830
2009	9,400

Sumber: Badan Pusat Statistik 1995-2009

Rumusan Masalah

- Apakah tingkat suku bunga SBI dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap tingkat Inflasi di Indonesia?
- Apakah pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia?
- Apakah jumlah uang beredar dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia?
- Apakah penerimaan ekspor dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia?
- Apakah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia?
- Apakah variabel-variabel independen tersebut di atas secara bersama-sama mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat mengetahui pengaruh tingkat suku bunga SBI, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), jumlah uang beredar, penerimaan ekspor, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap tingkat Inflasi di Indonesia tahun 1990 - 2009.

Kajian Pustaka

Kesimpulan dari penelitian Jaka Sriyana (2001) adalah, agar pengeluaran pemerintah efektif dan efisien, maka fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus berjalan dengan baik. Indonesia bisa menggunakan konsep *Planning Programming And Budgeting System* (PPBS) untuk mengelola pengeluaran pemerintahnya. Pemberantasan korupsi dan kolusi merupakan masalah utama di lingkungan birokrat kita untuk mengurangi kebocoran anggaran, sehingga bisa lebih menghemat anggaran belanja Negara. Hal ini perlu dilakukan karena akan menyebabkan *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi).

Kanthi Nalarantini (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan jika Bank Indonesia ingin menurunkan inflasi maka dapat diturunkan tingkat suku bunga SBI. Karena apabila tingkat suku bunga SBI turun maka suku bunga kredit yang ada pada bank-bank umum juga mengalami penurunan, sehingga investasi pada sektor riil kembali meningkat yang akan menyebabkan output meningkat. Untuk menstabilkan keadaan perekonomian pasca krisis ekonomi tahun 1997 sebaiknya pemerintah lebih mengawasi dan memperketat dalam hal pinjaman khususnya utang luar negeri.

Yunan Ardiansyah (2003) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Bank Indonesia sangat berperan penting dalam mengendalikan laju inflasi, diantaranya adalah dengan menentukan tingkat suku bunga SBI serta mengawasi peredaran uang dalam masyarakat. KLBI berhubungan positif dengan tingkat inflasi, penurunan kredit likuiditas Bank Indonesia akan menurunkan tingkat inflasi.

Landasan Teori

1. Inflasi

Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Adakalanya inflasi terjadi sebagai akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini

biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Namun sering kali inflasi berlaku sebagai akibat dari permintaan masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi (Sadono Sukirno, 1994).

Definisi dari inflasi adalah proses kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang naik dengan presentase yang sama, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu (Nopirin, 1987).

2. Tingkat Suku bunga SBI

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan sertifikat deposito yang diterbitkan Bank Indonesia dan dapat dijual kepada bank-bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) serta dapat diperjual belikan diantara mereka (Farid Wijaya, 1989). Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek dengan menggunakan sistem diskonto. Lelang surat berharga bank sentral sebagai instrumen OPT dengan SBI.

3. Pengeluaran Pemerintah

Anggaran (*budget*) pemerintah, sumber utama penerimaan negara adalah pajak, disamping penerimaan dari utang luar negeri dan sumber penerimaan dalam negeri lainnya (Sadono Sukirno, 2004). Pengeluaran pemerintah terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri atas:

- a. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah
- b. Belanja barang
- c. Subsidi daerah otonom
- d. Membayar bunga dan cicilan utang
- e. Lain-lain

Pengeluaran pembangunan pemerintah meliputi:

- a. Pembiayaan rupiah, adalah selisih antara penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin pemerintah.
- b. Bantuan proyek.

Pengeluaran rutin adalah belanja pemerintah pusat diluar pengeluaran pembangunan. Pengeluaran itu digunakan untuk membiayai administrasi pemerintah, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, subsidi kepada masyarakat, bantuan sosial, serta pengeluaran yang tidak terduga. Mulai tahun 2000–2004 pengeluaran pemerintah menggunakan Perhitungan Anggaran Negara, dan mulai tahun 2005–2009 menggunakan realisasi Anggaran Belanja Terpadu, yaitu menyatukan pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan.

4. Jumlah Uang Beredar (JUB)

Jumlah Uang Beredar (*money supply*) didefinisikan sebagai tagihan masyarakat terhadap sektor perbankan dan terbatas pada jumlah uang kartal dan uang giral. Ini berarti Indonesia secara resmi menganut konsep JUB M1 (*narrow money*).

Penawaran uang atau JUB dapat didefinisikan jumlah seluruh uang kartal yang dipegang anggota masyarakat (*the non-bank publik*) dan *demand deposit* yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum (Iswardono, 1990).

Kenaikan JUB cenderung akan mengakibatkan kenaikan inflasi. Oleh karena itu, kebijakan pengaturan JUB melalui instrumen OPT dan penjualan surat berharga bank sentral perlu dilakukan. Dengan instrumen ini volume JUB dapat ditekan dalam batasan tertentu sehingga laju inflasi bisa mencapai target yang diinginkan.

5. Penerimaan Ekspor

Pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Kenaikan ekspor menambah pengeluaran agregat dan pada waktu yang sama kenaikan harga-harga menjadi lebih cepat. Tanpa kebijakan pemerintah maka harga-harga akan mengalami kenaikan. Dengan demikian kenaikan pengeluaran agregat akan meningkatkan pendapatan nasional dan harga (Sadono Sukirno, 2004).

6. Nilai Tukar Rupiah

Kurs adalah perbandingan nilai atau harga mata uang nasional tertentu dengan mata uang nasional lainnya. Kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawarannya. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan pembayaran impor, diturunkan dari transaksi debit dalam neraca pembayaran internasional. Suatu mata uang dikatakan kuat jika transaksi autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous debit (surplus). Sebaliknya dikatakan lemah jika mengalami defisit atau jika permintaan valuta asing melebihi penawarannya.

Hubungan Antara Variabel-variabel Independen dengan Inflasi

1. Tingkat Suku Bunga SBI

Suku bunga SBI riil, yaitu suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Apabila JUB di masyarakat meningkat, maka BI menaikkan tingkat suku bunga SBI, akan mempengaruhi tingkat bunga tabungan dan kredit pada bank umum (suku bunga kredit meningkat di atas tingkat suku bunga SBI), sehingga investasi

pada sektor riil akan mengalami penurunan yang akan berdampak pada penurunan output (asumsi permintaan konstan), akan menyebabkan tingkat harga semakin tinggi. Dengan demikian tingkat suku bunga mempunyai hubungan positif dengan tingkat inflasi.

2. Pengeluaran Rutin Pemerintah

Pemerintah memegang peranan penting dalam mengendalikan laju inflasi, salah satu kebijakannya adalah mengatur pengeluaran rutinnya (*government expenditure*). Kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan total, dan akan membuat peningkatan inflasi dalam negeri.

3. Jumlah Uang Beredar

JUB berpengaruh positif terhadap inflasi. Peningkatan JUB yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

4. Penerimaan Ekspor

Pendapatan yang dihasilkan dari produksi ekspor berhubungan dengan proporsi pendapatan yang masih tetap ada di negara asal. Meningkatnya ekspor akan meningkatkan pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat akan meningkatkan pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa, dan akan berimbas pada naiknya harga-harga barang dan jasa di dalam negeri sehingga akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi.

5. Nilai Tukar Rupiah

Penurunan harga barang-barang ekspor di luar negeri menyebabkan penurunan pada penjualan barang-barang ekspor, sehingga output akan menurun yang menyebabkan berkurangnya *supply* barang, padahal permintaan konstan ataupun meningkat sehingga menaikkan harga-harga barang dalam negeri. Naiknya harga-harga barang dalam negeri berdampak pada meningkatnya inflasi. Melemahnya nilai rupiah terhadap Dollar akan mengakibatkan tingkat inflasi menjadi tinggi.

Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

- a. Diduga tingkat suku bunga SBI dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi.
- b. Diduga pengeluaran rutin pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi.

- c. Diduga jumlah uang yang beredar dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi.
- d. Diduga penerimaan ekspor dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi.
- e. Diduga nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi.
- f. Diduga secara serempak semua variabel independen yang digunakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode ECM (*Error Correction Model*). ECM ini memungkinkan untuk mengestimasi hubungan antara inflasi dan penentu-penentunya, meliputi dinamika jangka pendek maupun jangka panjang antar series. Parameter β_1 mengukur respon inflasi masing-masing periode untuk sampai pada keseimbangan jangka panjang. Adapun alasan digunakannya model koreksi kesalahan adalah: pertama, mekanisme koreksi kesalahan memiliki keunggulan baik dari segi nilainya dalam menghasilkan persamaan yang diestimasi dengan properti statistik yang diinginkan maupun dari segi kemudahan persamaan tersebut untuk diinterpretasikan; kedua, model koreksi kesalahan dapat memecahkan masalah variabel runtun waktu yang tidak stasioner dan regresi lancung atau korelasi lancung dalam analisis ekonometrika melalui penggunaan variabel perbedaan yang tepat di dalam model, namun tanpa menghilangkan informasi jangka panjang yang diakibatkan penggunaan dan perbedaan semata.

Regresi

Penelitian ini menggunakan model akan dianalisis dengan persamaan dasar:

$$\text{Inflasi} = \beta_0 + \beta_1 \text{SBI} + \beta_2 \text{PRP} + \beta_3 \text{JUB} + \beta_4 \text{EKS} + \beta_5 \text{VAL} + \mu$$

Keterangan:

- Inflasi = Tingkat inflasi di Indonesia
- SBI = Tingkat Suku Bunga Indonesia
- PRP = Pengeluaran Rutin Pemerintah
- JUB = Jumlah Uang Beredar
- EKS = Penerimaan Ekspor Indonesia
- VAL = Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien
- μ = Variabel Gangguan

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat dibentuk Model ECM-nya menjadi sebagai berikut:

$$D\text{Inflasi} = \beta_0 + \beta_1\text{DSBI} + \beta_2\text{DPRP} + \beta_3\text{DJUB} + \beta_4\text{DEKS} + \beta_5\text{DVAL} + \beta_6\text{SBI}(-1) + \beta_7\text{PRP}(-1) + \beta_8\text{JUB}(-1) + \beta_9\text{EKS}(-1) + \beta_{10}\text{VAL}(-1) + \beta_{11}\text{ECT}(-1) + \mu$$

Keterangan:

DInflasi	=	Inflasi – Inflasi(-1)
DSBI	=	SBI – SBI(-1)
DPRP	=	PRP – PRP (-1)
DJUB	=	JUB – JUB(-1)
DEKS	=	EKSPOR – EKSPOR(-1)
DVAL	=	VALUTA – VALUTA(-1)
ECT	=	SBI + PRP + JUB + EKS + VAL – Inflasi
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{10}$	=	Koefisien regresi ECM jangka pendek
β_{11}	=	Koefisien ECT (<i>error correction term</i>)

Berikut adalah tahap-tahap pengujian analisis regresi (Agus W, 2005).

a. Uji Akar Unit

Uji akar unit (*unit root test*) merupakan bagian dari uji stasioneritas dimaksudkan untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model autoregresif yang ditaksir memiliki nilai satu atau tidak. Namun demikian model autoregresif tidak memiliki model yang baku, maka untuk menguji hipotesisnya digunakan metode pengujian yang dikembangkan oleh Philip Peron (PP).

b. Uji Derajat Integrasi

Jika setelah dilakukan pengujian akar unit ternyata data tersebut belum stasioner, maka dilakukan pengujian ulang dengan menggunakan data nilai perbedaan pertamanya (*first difference*), apabila belum juga stasioner, maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan data dari nilai perbedaan kedua (*second difference*) dan seterusnya hingga diperoleh data yang stasioner.

c. Uji Kointegrasi

Tujuan dilakukannya uji kointegrasi adalah untuk mengkaji stasioneritas residual regresi kointegrasi. Pada prinsipnya dalam model ECM terdapat keseimbangan jangka panjang yang tetap diantara variabel-variabel ekonomi, jika dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode, maka model koreksi kesalahan akan mengoreksinya pada periode berikutnya. Mekanisme koreksi kesalahan ini dapat diartikan sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang.

Hasil Analisis Data

1. Uji Akar Unit dan Uji Integrasi

Hasil estimasi akar unit pada uji derajat integrasi kedua menunjukkan bahwa semua variabel sudah stasioner pada derajat integrasi kedua, nilai hitung statistik semua variabel lebih besar dari nilai kritis Mackinnon pada $\alpha = 5\%$.

Tabel 6
Hasil Estimasi Uji Derajat Integrasi Kedua

Variabel	Nilai Hitung t-statistik	Nilai Kritis Mackinnon pada $\alpha = 5\%$
	PP	PP
Y	-21,75679	-3,052169
X1 (SBI)	-29,44309	-3,052169
X2 (PRP)	-8,684267	-3,052169
X3 (JUB)	-13,10314	-3,052169
X4 (EKS)	-4,187996	-3,052169
X5 (VAL)	-9,986960	-3,052169

Sumber: Hasil Olah Eviews

2. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar unit dan uji derajat integrasi, sebagai uji keberadaan hubungan jangka panjang. Tujuan utama uji kointegrasi adalah untuk mengetahui residual regresi terkointegrasi stasioner atau tidak. Apabila variabel terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Dan sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka tidak ada keterkaitan hubungan dalam jangka panjang.

Tabel 7
Nilai Regresi Uji Kointegrasi

Persamaan Kointegrasi	CRDW Hitung	CRDW Tabel $\alpha =$ 5%
$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$	3,102610	0,78

Sumber: Hasil Olah Eviews

Hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa nilai CRDW hitung lebih besar dari nilai CRDW tabel, maka artinya terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara variabel SBI, PRP, JUB, EKS, VAL dengan Inflasi.

3. Analisis Jangka Panjang

Tabel 8
Hasil Uji-t Jangka Panjang

Variabel	t-hitung	t-tabel
SBI	-11,42307	1,753
PRP	2,982896	1,753
JUB	-5,733837	1,753
EKS	1,782102	1,753
VAL	3,338555	1,753

Sumber: Hasil Olah Eviews

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, yang dapat diambil kesimpulan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , artinya variabel SBI, PRP, JUB, EKS dan VAL berpengaruh signifikan terhadap Inflasi.

$$\text{Inflasi} = 17,74697 - 2,325794 \text{ SBI} + 0,000102 \text{ PRP} - 0,000266 \text{ JUB} + 0,000311 \text{ EKS} + 0,001947 \text{ VAL} + \mu$$

Berdasarkan hasil estimasi regresi jangka panjang di atas, interpretasi koefisien regresi variabel-variabel dalam model regresi linier adalah:

a. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Inflasi

Koefisien regresi SBI berpengaruh signifikan negatif terhadap inflasi. Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan permintaan investasi menurun, sehingga ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, akibatnya kapasitas produksi akan menurun. Biaya produksi akan meningkat karena meningkatnya biaya modal dan harga output, yang berdampak pada kenaikan inflasi. Pemerintah mengimbangi penurunan investasi yang berdampak pada menurunnya output dengan menempuh kebijakan fiskal yaitu menaikkan pengeluarannya. Kenaikan pengeluaran pemerintah dengan penurunan pajak, akan berakibat pada menurunnya biaya modal, sehingga output akan meningkat. Peningkatan pada sisi output akan menekan harga dan inflasi.

b. Pengaruh Pengeluaran Rutin Pemerintah Terhadap Inflasi

Koefisien regresi PRP sebesar 2,982896. Artinya jika pengeluaran rutin pemerintah meningkat sebesar 1 triliun, maka tingkat inflasi akan naik sebesar 2,982896%.

c. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi

Koefisien regresi JUB berpengaruh negatif karena peningkatan JUB di masyarakat dibarengi dengan permintaan uang yang tinggi menyebabkan sisi penawaran dan permintaan uang seimbang, sehingga investasi pada sektor riil akan

meningkat. Meningkatnya investasi pada sektor riil akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan dapat menekan laju inflasi.

d. Pengaruh Penerimaan Ekspor Terhadap Inflasi

Koefisien regresi EKS berpengaruh signifikan sebesar 1,782102. Artinya bahwa jika ekspor meningkat sebesar 1 juta US\$, maka inflasi juga akan meningkat sebesar 1,782102%.

e. Pengaruh Valuta Asing Terhadap Inflasi

Koefisien regresi VAL berpengaruh signifikan sebesar 3,338555. Artinya meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp 1,- akan meningkatkan tingkat inflasi sebesar 3,338555%.

4. Pendekatan *Error Correction Model* (ECM)

Tabel 9
Hasil Uji-t Jangka Pendek

Variabel	t-hitung	t-tabel
DSBI	-6,904280	1,753
DPRP	1,078245	1,753
DJUB	-1,487107	1,753
DEKS	0,400946	1,753
DVAL	2,139607	1,753
ECT	-2,342795	1,753

Sumber: Hasil Olah Eviews

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, yang dapat diambil kesimpulan untuk menolak H_a dan menerima H_o , artinya variabel SBI dan VAL signifikan sedangkan variabel PRP, JUB dan EKS tidak signifikan terhadap Inflasi.

Hasil estimasi model dinamis ECM sebagai berikut:

$$D_{Inflasi} = 5,350545 - 2,254150D_{SBI} + 0,000101D_{PRP} - 0,000205D_{JUB} + 0,000198D_{EKS} + 0,004002D_{VAL} - 0,121575S_{BI(-1)} + 2,81PRP_{(-1)} + 4,52JUB_{(-1)} - 0,000182EKS_{(-1)} - 0,000276VAL_{(-1)} - 1,166300ECT_{(-1)} + \mu$$

Berdasarkan estimasi model dinamis ECM di atas, menjelaskan variasi pada variabel dependen koefisien ECT sebesar -1,166300, artinya bahwa perbedaan antara nilai aktual Inflasi dengan nilai keseimbangannya sebesar

1,166300 akan disesuaikan dalam waktu satu tahun. Berikut analisis interpretasi koefisien regresi variabel-variabel dalam model ECM:

a. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Inflasi

Hasil perhitungan dalam jangka pendek menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel SBI (D_{SBI}) signifikan terhadap variabel inflasi yaitu sebesar 2,254150. Artinya bahwa dalam jangka pendek meningkatnya tingkat suku bunga sebesar 1%, akan meningkatkan inflasi sebesar 225,4150%. Dalam jangka pendek terjadi hubungan yang negatif dengan inflasi. Penurunan suku bunga SBI akan mengakibatkan tingkat bunga pada bank-bank umum menurun. Permintaan investasi meningkat sebagai akibat dari turunnya suku bunga. Kenaikan pada investasi akan menaikkan output, dan konsumsi akan meningkat. Peningkatan pada konsumsi akan meningkatkan harga-harga barang, begitu juga inflasi.

b. Pengaruh Pengeluaran Rutin Terhadap Inflasi

Koefisien regresi variabel D_{PRP} tidak signifikan terhadap variabel inflasi. Pengeluaran pemerintah yang meningkat akan turut meningkatkan permintaan agregat, yaitu permintaan akan uang dan investasi. Namun kenaikan investasi ini akan membuat pemerintah menambah sisi penerimaannya, dengan menaikkan pajak yang akan mengurangi daya beli, sehingga tingkat konsumsi akan turun.

c. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi

Koefisien regresi variabel D_{JUB} tidak signifikan terhadap inflasi. Dalam jangka pendek penurunan JUB akan menaikkan tingkat suku bunga, rencana investasi akan banyak yang dibatalkan karena meningkatnya biaya produksi dan biaya modal, yang berdampak pada menurunnya output, dan akhirnya harga output akan semakin tinggi. Kenaikan pada harga-harga output akan meningkatkan laju inflasi.

d. Pengaruh Penerimaan Ekspor Terhadap Inflasi

Koefisien regresi variabel D_{EKS} tidak signifikan terhadap inflasi. Kenaikan pada ekspor akan turut meningkatkan pengeluaran agregat, sehingga harga-harga akan cepat naik yang dapat memicu naiknya inflasi. Namun kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah, meningkatkan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat yang akan menekan tingkat harga, atau melakukan kebijakan yang berkaitan dengan output misalnya kebijakan penurunan bea masuk impor, sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga, sehingga dalam jangka pendek ekspor tidak signifikan mempengaruhi inflasi.

e. Pengaruh Valuta Asing Terhadap Inflasi

Koefisien regresi variabel D_{VAL} berpengaruh signifikan terhadap inflasi yaitu sebesar 0,004002. Artinya bahwa dalam jangka pendek menguatnya nilai tukar rupiah sebesar Rp 1,- akan meningkatkan inflasi sebesar 0,4002%.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. SBI dalam jangka panjang signifikan tetapi tidak sesuai dengan hipotesis sedangkan dalam jangka pendek signifikan terhadap inflasi.
- b. Pengeluaran rutin pemerintah dalam jangka panjang signifikan terhadap inflasi, sedangkan dalam jangka pendek tidak signifikan terhadap inflasi. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini dapat dikarenakan data yang digunakan adalah data per tahun, sehingga dalam jangka pendek pengeluaran rutin pemerintah tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap inflasi.
- c. JUB dalam jangka panjang signifikan tetapi tidak sesuai dengan hipotesis sedangkan jangka pendek tidak signifikan terhadap inflasi.
- d. Penerimaan ekspor dalam jangka panjang signifikan terhadap inflasi, sedangkan dalam jangka pendek tidak signifikan terhadap inflasi. Seperti halnya pengeluaran rutin, tidak signifikannya penerimaan ekspor dapat dikarenakan data yang digunakan adalah data per tahun, sehingga dalam jangka pendek penerimaan ekspor tidak dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap inflasi.
- e. Valuta asing dalam jangka panjang dan jangka pendek signifikan terhadap inflasi.
- f. Hasil dari uji-F pada jangka panjang maupun jangka pendek bahwa secara bersama-sama variabel SBI, PRP, JUB, EKS, dan VAL berpengaruh signifikan terhadap inflasi.
- g. Nilai koefisien determinasi jangka panjang sebesar 0,921651 artinya 92,16% variasi variabel SBI, PRP, JUB, EKS, dan VAL mempengaruhi inflasi. Sedangkan jangka pendek nilai koefisien determinasi sebesar 0,974623 artinya 97,46% variasi variabel SBI, PRP, JUB, EKS, dan VAL mempengaruhi inflasi.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah:

- a. Adanya hubungan yang negatif antara suku bunga SBI dengan inflasi mengharuskan pemerintah untuk menjalankan otoritas kebijakan-kebijakannya. Saat suku bunga SBI turun, inflasi meningkat dan hal ini dapat

- ditekan dengan kebijakan fiskal pemerintah yaitu dengan menaikkan pajak. Meningkatnya pajak akan membuat daya beli konsumen turun, sehingga dapat menekan tingkat harga, pada akhirnya juga akan menekan inflasi.
- b. Besarnya pengeluaran pemerintah memicu inflasi tinggi, oleh sebab itu untuk menekan laju inflasi, pemerintah harus dapat mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak. Seperti halnya pada dampak penurunan SBI, kenaikan pajak akan mengurangi kemampuan daya beli, sehingga akan menurunkan permintaan. Menurunnya permintaan agregat akan menstabilkan harga barang.
 - c. Peningkatan JUB akan menurunkan inflasi karena permintaan investasi meningkat. Agar terjadi kestabilan ekonomi jangka panjang maka pemerintah sebaiknya memacu gairah investasi, sebab dengan investasi yang meningkat banyak rencana investasi yang dapat diwujudkan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada stabilnya tingkat inflasi.
 - d. Penerimaan ekspor yang tinggi ikut memacu laju inflasi karena meningkatkan pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa. Untuk menekan laju inflasi saat ekspor meningkat maka pemerintah harus mengurangi pengeluarannya agar pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa dapat dikendalikan, begitu juga inflasi. Kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah penurunan bea masuk impor yang cenderung akan menurunkan harga barang di dalam negeri karena jumlah barang di dalam negeri bertambah.
 - e. Kenaikan pada nilai tukar terhadap dollar memacu inflasi. Beberapa faktor yang berperan diantaranya adalah keamanan dan kondisi politik negara yang tidak kondusif, sehingga investor tidak berani menanamkan modal di dalam negeri, atau banyaknya JUB di masyarakat yang tidak terkendali sehingga nilai uang jatuh. Untuk itu pemerintah diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan kondisi keamanan dan politik negara yang kondusif, serta mengawasi dengan ketat jumlah uang yang beredar lewat kebijakan-kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono, 2005, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, Yogyakarta, beberapa edisi.
Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia*, Yogyakarta, beberapa edisi.
Boediono, 1980, *Ekonomi Moneter*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
_____, 1985, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Ekonomi Makro*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.
Farid Wijaya, 1989, *Ekonomikamakro*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
Iswardono S. Pramono, 1990, *Uang dan Bank*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.
Jaka Sriyana, 2001, "Dampak Ekspansi Fiskal Terhadap Inflasi: Studi Empiris dengan Pendekatan ECM", *JEP*, Volume VI, No. 2, 203 – 212.
Kanthi Nalarantini, 2007, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Tahun 1990 – 2005", *Jurnal dan Perpustakaan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Nopirin, 1992, *Ekonomi Internasional*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
_____, 1987, *Ekonomi Moneter*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
Sadono Sukirno, 1994, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_____, 2004, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
T. Gilarso, 1986, *Ekonomi Indonesia: Sebuah Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta.
Yunan Ardiansyah, 2003, "Analisis Tingkat Inflasi dan Peranan BI dalam Mengendalikannya", (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.